



**PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH SATU
ALAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI
DESA PERKEBUNAN BUNGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh :

DOLLY SISKA RANI
NPM 1515100043

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : DOLLY SISKA RANI
NPM : 1515100043
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
**JUDUL SKRIPSI : PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH
SATU ALAT PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DI DESA PERK. BUNGARA**

MEDAN, MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(ANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si) (RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si, AK., CA)

ANGGOTA - I

ANGGOTA - II

(OKTARINI KHAMILAH, SE., M.Si)

ANGGOTA - III

(AULIA, SE., MM)

ANGGOTA - IV :

(Drs. ABDUL HASYIM BB, Ak., MM)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DOLLY SISKA RANI
NPM : 1515100043
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERANAN ANGGARAN SEBAGAI SALAH
SATU ALAT PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DI DESA PERK. BUNGARA

MEDAN, MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(PANGGI PRATAMA NASUTION, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si., AK., CA)

PEMBIMBING II

(OKTARINI KHAMILAH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dolly Siska Rani
NPM : 1515100043
Fakultas / Program Studi : Sosial Sains / Akuntansi
Judul Rencana : Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat
Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian
Pembangunan Di Desa Perk. Bungara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak beban Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan tidak benar.

Medan, Maret 2019


(Dolly Siska Rani)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dolly siska rani
Tempat / Tanggal Lahir : Bungara / 16-08-1997
NPM : 1515100043
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jalan. Setia Budi Pasar 1 Gang Mawar No. 8

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan



(Dolly Siska Rani)

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2114/Perp/Unpab/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

Medan, 22 APR 2019



FM-BF

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 22 April 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DOLLY SISKI RANI
Tempat/Tgl. Lahir : Bungara / 16 Agustus 1997
Nama Orang Tua : SISWANTO
N. P. M : 1515100043
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081360607454
Alamat : Jl. Setia Budi Pasar 1 Tanjung Sari Gg. Mawar No. 8



Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan Judul Peranan Anggaran sebagai salah Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan di Desa Perkebunan Bungara, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan tr sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk peng dan warna penjiwaan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatanga pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	600.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2.250.000

22/04/2019
Dolly Siska Rani

Ukuran Toga : L



Diketahui/Dipertujui oleh :
Dr. Survin Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Horat saya
DOLLY SISKI RANI
1515100043

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



an
TEGUH WAHYO, SE., MM.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpa@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahma Purba, SE, Msi, Ak, CA
 Dosen Pembimbing II : Oktarni Khamilah, SE, Msi
 Nama Mahasiswa : DOLLY SISKARANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100043
 Bidang Pendidikan : (Sa)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian pembangunan di Desa Perkebunan Bungara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03-03-2019	Perbaiki sistematika penulisan Skripsi tentang penomoran ds Bab 1 1.1, tabel waktu penelitian ds Perbaiki dan tabel data sumber lainnya. tabel definisi operasional serta kalimat dan penulisan yg kurang atau lebih.		
03-03-2019	Perbaiki cover dan daftar pustaka ds lengkapi Ace & Sidiyng Maja Hajar		

Dosen Pembimbing II

 Oktarni Khamilah, SE, Msi

Medan, 05 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Rahuma Purba, SE, M.si, Ak. CA
 Dosen Pembimbing II : Okbarin Ichamillah, SE, M.si
 Nama Mahasiswa : DOLLY SISKA RANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100043
 Jenjang Pendidikan : (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian Pembangunan Di Desa Perkebunan Sungara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5/3 - 2019.	Bab 2 : Tentang Perencanaan Pembangunan Bab 4 Hasil Penelitian. Pembahasan. Hambatan / Tantangan	<i>[Signature]</i>	
12/3 - 2019.	Bab 4 Analisis hasil penelitian	<i>[Signature]</i>	
18-3-2019 acc Sidag Maja Hujan. <i>[Signature]</i>			

Medan, 05 Maret 2019

Diketahui/Disetujui oleh :





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

PM-BPAA-2012-030

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Rahima Purba, SE, Msi, Ak, CA
 Pembimbing II : Oktorini Khamilah, SE, Msi
 Nama Mahasiswa : DOLLY SISKA RANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100043
 Bidang Pendidikan : (SI)
 Tugas Akhir/Skripsi : Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan
 Dan Pengendalian Pembangunan di Desa
 Perkebunan Bungara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12-2018	Daftar pustaka. Rumusan masalah. Tujuan penelitian. Skala di definisi operasional.	<u>SZ</u>	
12-2018	Acc Seminar Proposal.	<u>SZ</u>	
/			Acc Seminar Proposal 12-13-2018 <u>[Signature]</u>

Medan, 14 Desember 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi

Fakultas : SOSIAL SAINS

Pembimbing I : Rahuma Purba, SE, M.Si, Ak, CA

Pembimbing II : Oktarina Khamidah, SE, M.Si

Nama Mahasiswa : DOLLY SISKA RANI

Program Studi : Akuntansi

Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100043

Jenjang Pendidikan : (S.1)

Tugas Akhir/Skripsi : Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu alat Perencanaan dan pengendalian pembangunan di Desa Perkebunan Bungara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12-18	Perbaiki sistematika penulisan Proposal yaitu penomoran, tabel peneliti terdahulu, Cover, kata pengantar, sumber peneliti dan daftar pustaka		
12-18	Perbaiki sistematika penulisan proposal pada tabel peneliti terdahulu, Daftar pustaka ACC & Seminar proposal		

Medan, 14 Desember 2018

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Ningsih, S.Pd., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DOLLY SISKA RANI
 Tempat/Tgl. Lahir : Bungara kecamatan Bahorok / 16 Agustus 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100043
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 122 SKS, IPK 3.23
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul SKRIPSI	Persetujuan
1.	Analisis pengaruh Earning Management terhadap nilai Perusahaan dengan peranan Praktik corporate governance sebagai moderating variabel . Dinas penanaman Modal dan layanan terpadu satu pintu Medan.	<input type="checkbox"/>
2.	Analisis anggaran biaya desa yang di salurkan pemerintah sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya produksi proyek di Desa Perkebunan Bungara	<input type="checkbox"/>
3.	Peranan Anggaran sebagai salah satu alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Desa Perkebunan Bungara.	<input checked="" type="checkbox"/>

SB : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)
 (Rektor)

Medan, 14 Desember 2018

 (Dolly Siska Rani)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 15 Desember 2018
 Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 15 Desember 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rahma Farha, SE., M.Si., Ak. CA)

Tanggal : 18 Desember 2018
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

 (Oktaria Khairatiah, SE., M.Si)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01	Revisi: 02	Tgl. Eff: 20 Des 2015
----------------------------	------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

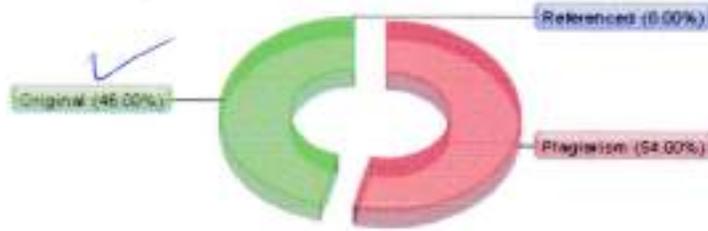
Analyzed document: 27/03/2019 08:24:07

"DOLLY SISKA
RANI_1515100043_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite, Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 31	wrds: 3464	http://www.depkes.go.id/resources/download/generasi/UN_20Nomor%2006%20Tahun2%20009%20tentan...
% 30	wrds: 3334	https://lahsana7107.wordpress.com/2015/06/06/permendagri-no-114-tahun-2014/
% 21	wrds: 2416	http://www.dpk.depkes.go.id/attach/post-no-39-tahun-2009-tertang-pajak-dasar-dan-retribu...

[Show other Sources:]

Processed resources details:

260 - Ok / 21 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urts:





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN BAHOROK
DESA PERKEBUNAN BUNGARA

Alamat : Desa Perk. Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Kode Pos : 20774

Bungara, 1 Februari 2019

Nomor : 145-4e / PB/ II / 2019
Sifat : Biasa
Lamp :-
Perhil : Permohonan Research

Kepada Yth,
Dekan fakultas sosial sains
Universitas pembangunan panca budi
Di
Medan

Sehubungan Dengan Surat Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Nomor : 3352 / 17 /FSSA / 2019 Pada Tanggal 22 Januari 2019 Dengan Perhil Permohonan Research/Riset Dengan Ini Kami Menerima Mahasiswa Yang Berada Dibawah Ini Untuk Melakukan Penelitian, Dengan Persyaratan Dapat Mematahui Peraturan Yang Ada Di Kantor Desa Perk. Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.

Nama : Dolly Siska Rani

Npm : 1515100043

Prodi : Akuntansi

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

Kepala Desa Perk. Bungara



ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data melalui beberapa tahapan sebagai berikut : reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini dilakukan pada kantor Desa Perk. Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. Berdasarkan data yang di peroleh dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anggaran sudah menjadi alat perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan di desa perk. Bungara dimana anggaran yang dirancang sudah melalui tahapan-tahapan penyempurnaan yang dilihat dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran yang di dapat Desa Perk. Bungara di peroleh dari dana desa, kemudian dana desa yang diperoleh di jabarkan melalui rancangan anggaran realisasi yang dimana anggaran realisasi yang dibuat untuk meningkatkan prasarana dan sarana desa. Dalam perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan, masyarakat juga berpartisipasi dalam pengawasan dimana pengawasan dilakukan dalam organisasi badan permusyawaratan desa (BPD).

Kata Kunci : Peranan Anggaran, Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Pembangunan, Desa

ABSTRACT

This research is a qualitative research with a descriptive approach using data collection techniques through interviews and documentation. Then the data obtained were analyzed using data analysis techniques through the following stages: data reduction, data display, and conclusion / verification. This research was conducted at the Perk Desa office. Bungara, Bahorok District, Langkat Regency. Based on the data obtained in the field, the authors can conclude that the budget has become a tool of development planning and control of development in rural villages. Bungara where the budget is designed has gone through the stages of improvement seen from the previous year's budget. The budget obtained by Perk Village. Bungara was obtained from village funds, then the village funds obtained were elaborated through a draft budget realization in which the budget realization was made to improve village infrastructure and facilities. In development planning and development control, the community also participates in supervision where supervision is carried out in the organization of village consultative bodies (BPD).

Keywords: Role of the Budget, Development Planning, Development Control, Village

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Pembangunan Dan Pengendalian Pembangunan Di Desa Perkebunan Bungara**)” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi untuk memperoleh gelar Strata (S1) Ekonomi Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca budi Medan.
4. Ibu Rahima br.Purba, SE.,M.Si.Ak.CA, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Oktarini Khamilah, SE,.M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada orang tua yang saya cintai yakni Ayahanda Siswanto dan Ibunda Nuraini, Adik saya Nikke Yulanda dan Della Aisyah. Terimakasih atas doa dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya skripsi saya ini.
7. Kepada teman-teman Fakultas Sosial Sains Prodi Akuntansi khususnya kelas akuntansi Pagi dan Siang, Luh Kandi Ayu Tangkas, Holnaida Br Manurung, Dinda Liani Tarigan, Ektaria Sinuhaji, Mawar darni gulo, lili suryati ningsi, Kristina Panjaitan, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih atas dorongan dan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
8. Kepada teman spesial saya Timanta Pernangin-nangin yang telah banyak memberikan motivasi, doa, dan dukungannya selama mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini yang disebutkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, Terimakasih.

Medan, Maret 2019

Penulis

Dolly Siska Rani
NPM: 1515100043

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan Skripsi.....	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Surat Pernyataan	iii
Surat Pernyataan	iv
Abstrak.....	v
Abstrack.....	vi
Motto dan Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LandasanTeori.....	8
1. Anggaran	8
2. Perencanaan Pembangunan	17
3. Pengendalian Pembangunan	22
4. Pembangunan.....	27
5. Pemerintah Daerah.....	30
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Konseptual	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel dan Sumber Data.....	36
a. Populasi	36
b. Sampel	36

c. Jenis dan Sumber Data	36
D. Definisi Operasional Variabel	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMABAHASAN

A. Hasil Penelit.....	40
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	40
2. Perencanaan Pembanguna Desa.....	46
3. Pengendalian Pembangunan Desa.....	48
4. Penyusunan Dan Pengelolaan Anggaran Desa.....	51
B. Pembahasan.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	31
Tabel 3.1	35
Tabel 3.2	37
Tebal 4.1	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	34
Gambar 4.1	41

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu referensi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 1, dijelaskan bahwa pengertian Desa yakni, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus segala urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara kesatuan Indonesia.

Seorang Kepala Desa memegang kunci kesuksesan dalam memainkan peran penting dalam kegiatan pembangunan yang ada di desa seperti yang sudah di anggarakan. Masalah pengendalian dan pendanaan yang dilakukan dengan sembarangan akan mengakibatkan konsekuensi yang berbeda pula nantinya. Pada umumnya desa akan beroperasi teratur dalam mengarahkan sumber daya untuk mendapatkan kesempatan dan hasil yang membutuhkan perencanaan, pengendalian serta menganalisanya dengan baik pula. Pengendalian tersebut akan mencapai sasaran dengan adanya. Dalam hal perencanaan dan pembangunan, dana anggaran desa sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 pasal 72 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil

aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dll.

Perencanaan merupakan tahap awal bagi desa, dalam melakukan suatu kegiatan atau dengan kata lain perencanaan merupakan tujuan kedepan untuk memajukan dan melihat tindakan yang harus dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di desa. Anggaran Dana Desa atau ADD, yang ada di desa pun akan berbeda sesuai dengan jenis dan bidang yang akan digunakan nantinya.

Serta Pembangunan yang sedang dilakukan oleh suatu wilayah selalu diikuti dengan perkembangan dari berbagai aspek yang terus meningkat pesatsulit. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka berbagai upaya dilakukan oleh setiap lembaga atau pun desa guna membenahi bangunan yang ada di desa. Hal ini berdampak pada pada instansi-instansi pemerintah sebagai lembaga pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja untuk melakukan penyesuain terhadap perkembangan yang semangkin pesat ini agar setiap tujuan dapat terlaksana dengan baik dan memperkecil resiko serta kesalahan yang dapat memperlambat.

Anggaran digunakan sebagai alat perencanaan dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh dapat diketahui apakah rencana tersebut berhasil sesuai dengan yang diharapkan atau ada penyimpangan dan yang telah direncanakan. Pada dasarnya anggaran atau budget merupakan suatu kumpulan informasi yang sudah ditargetkan, suatu informasi menggambarkan suatu kegiatan yakni kegiatan pembangunan,

pengendalian biaya keuangan atau sejenis kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan yang ada di Desa Perkebunan Bungara.

Menurut Dharmanegara (2010), Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam suatu unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu dan (periode).

Sumber anggaran dana untuk pembangunan di desa, sebelumnya telah melakukan pengadaan perencanaan anggaran yang telah disusun untuk mengadakan perbaikan terhadap program pembangunan yang ada di desa agar lebih maju nantinya. Dan pembuatan anggaran tersebut sebelumnya akan di periksa oleh pusat, jika anggaran yang di buat disetujui maka mulailah anggaran tersebut bisa di jalankan.

Ketika anggaran telah disetujui maka desa tersebut akan memasuki langkah berikutnya. Maka tim pelaksana kerja akan melakukan kegiatan belanja desa yakni belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga dengan kata lain yang belum terprediksi.

Tahap perencanaan pembangunan di desa, setiap pekerjaan akan melakukan tahap awal yakni menyusun kegiatan perencanaan kerja, agar sesuai dengan semestinya. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintah desa dihadapkan dengan tugas yang lumayan berat, mengingat desa sebagai entitas yang dihadapkan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peran pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk pembangunan yang ada di desa. Berbagai perubahan bentuk sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dengan dijalankan melalui pemerintah desa.

Untuk menjalankan suatu perencanaan secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu mengembangkan kemajuan masyarakat desa serta lingkungan setempat.

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya gerakan pembangunan di desa dan itu juga harus diimbangi dengan pengembangan suatu kapasitas pemerintah desanya. Sehingga desa dan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan yang ada di desa, tetapi mereka dapat mempromosikan diri mereka sebagai salah satu pelaku pembangunan yang ada di desa.

Sedangkan menurut Mubyarto (2011), ialah partisipasi turut berperan serta didalam suatu kegiatan demi mencapai tujuan keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penelitian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian sangatlah penting dalam proses penganggaran, karna memerlukan pengawasan diperlukan guna mengevaluasi kinerja karyawan yang memerlukan perbaikan atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihak desa atau lembaga, apakah telah sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya. Pengendalian dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelajaran aktual dibandingkan dengan perencanaan yang terus menerus. Dengan demikian, apa yang akan menjadi tujuan perusahaan atau lembaga akan dicapai dengan semaksimal mungkin.

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perencanaan dan pengendalian mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung suatu proses pembangunan maupun lembaga guna mencapai tujuannya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui peran anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengkaji lebih jauh tentang peran anggaran dengan mengingat judul peneliti : **“Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan pembangunan Dan Pengendalian Pembangunan Di Desa Perkebunan Bungara.**

B. Indifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas maka yang menjadi idifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Anggaran desa yang sudah tersusun dan terencana belum semua dapat berperan secara efektif dalam proses pembangunan desa.
2. Kurangnya keterlibatan pemimpin dan masyarakat dalam pengawasan dan penyusunan anggaran desa yang membuat pembangunan di desa bungara terlambat untuk berkembang

C. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan dalam rangka meningkatkan peranan anggaran di Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok?

- b. Bagaimana penyusunan anggaran di Desa Perkebunan Bungara?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar peneliti tidak jauh dari masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan pembangunan dan Pengendalian Pembangunan di Desa Perkebunan Bungara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

2. Untuk Mengetahui perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan dalam rangka meningkatkan peranan anggaran di Desa Perkebunan Bungara.
3. Untuk Mengetahui penyusunan anggaran di Desa Perkebunan Bungara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengingat pemahaman mengenai keterkaitan anggaran serta pengendaliannya.
- b. Bagi penulis diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan pentingnya pengendalian agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada penyimpangan.
- c. Penulis mengetahui teori dan ilmu penelitian tentang peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian pembangunan di Desa Perkebunan Bungara.

- d. Manfaat Akademik, diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu di bidang pemerintah khususnya pemerintahan yang ada di desa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Farida Ulfa (2008) Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang berjudul Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi Pada Pengolahan Dana Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto). Sedangkan penelitian ini Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Di Desa Perkebunan Bungara.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada :

- a. Jumlah observasi/sampel : pada penelitian sebelumnya sampel yang digunakan adalah data APBD tahun anggaran 2004-2006. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan data anggaran desa Perkebunan Bungara tahun 2018.
- b. Lokasi penelitian : penelitian sebelumnya berlokasi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto, sedangkan pada penelitian ini dilakukan Di Desa Perkebunan Bungara.
- c. Waktu penelitian : penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2008, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi aktivitas (periode) tertentu di masa yang akan datang. oleh sebab itu rencana yang akan disusun dinyatakan dalam bentuk moneter, maka Anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan.

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana melakukannya. Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik.

Sebelum membahas tentang Anggaran secara mendalam, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian Anggaran itu sendiri. Menurut Ikhsaan (2009), memberikan pendapatnya mengenai Anggaran: Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari. Sedangkan Supriyono (2012) anggaran adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk

menunjukkan bagaimana sumber-sumber yang akan diperoleh selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.

Sedangkan Suharsimi (2010), Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Dan Nafarin (2013), Anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Adapun Menurut *Garisson Norren and Brewer* (2010) anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Sasongko dan Parulian (2013) berpendapat bahwa, Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari Anggaran diantaranya sejumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk periode yang akan datang. dan beberapa hal mengenai Anggaran yaitu:

- 1) Bahwa Anggaran bersifat formal, artinya Anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.
- 2) Bahwa Anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa Anggaran tersebut disusun secara berurutan dan berdasarkan suatu cara yang sudah diatur sebaik mungkin.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran pada sektor publik adalah sebagai berikut: Mardiasmo (2009),

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan alat esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa Anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah satu sasaran (*misappropriation*) dan pengalokasian Anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan program kegiatan pemerintah.

Sebagai alat pengendalian manajerial, Anggaran sektor publik digunakan untuk menyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, Anggaran digunakan untuk memberi informasi dan menyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

3. Anggaran sebagai Alat kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*).

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui Anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi, dan pengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan dan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, Anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk tertentu. Oleh karena itu pembuatan Anggaran publik membutuhkan *political skill*,

coalition building, keahlian dalam berorganisasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajemen publik.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication*).

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antara bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang mulai disusun dengan baik akan mampu mendeteksi akan terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu, Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kerja (*Performance Measurement Toll*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target Anggaran dan efisiensi pelaksanaan Anggaran. Kinerja manager publik dinilai berdasarkan beberapa hasil ia capai dikatakan dengan Anggaran yang telah ditetapkan Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja.

7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manager dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, Anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable*. Maksudnya adalah target Anggaran

hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

c. Tujuan Anggaran

Anggaran memiliki tujuan dimana anggaran memiliki periode tertentu sebagai alat dalam manajemen. Menurut M. Nafarina (2013:19) tujuan anggaran adalah sebagai berikut :

1. untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
2. untuk merasionalkan sumber dana investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal
3. untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan
4. untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
5. untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
6. untuk menyediakan alat pengukur dan pengendalian kinerja individu dan kelompok, serta ,menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

d. Jenis Anggaran

Anggaran memiliki pengelompokan dalam sebuah organisasi/perusahaan, dengan melakukan pengelompokan anggaran menjadi lebih mudah untuk disusun sesuai dengan keperluan yang diinginkan oleh sebuah

organisasi/perusahaan. Menurut M. Nafarin (2013:22) terdapat beberapa pengkelompokan anggaran, yaitu :

1. Menurut dasar penyusunan

- a) Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel.
- b) anggaran tetap, yaitu anggaran disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis.

2. Menurut cara penyusunan

- a) Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya dalam periode satu tahun yang disusun setiap periode anggaran.
- b) Anggaran kontinyu, adalah anggaran yang disebut untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat.

3. Menurut jangka waktu

- a) Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.
- b) Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang dibuat dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

4. Menurut fungsinya

- a) *appropriation budget*, adalah anggaran yang diperuntukan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain

b) *performance budget*, adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan/organisasi untuk menilai apakah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

e. Manfaat Anggaran

Manfaat anggaran sangat banyak sekali, salah satu manfaatnya anggaran untuk membuat pembangunan dan perencanaan yang akan di kerjakan dalam suatu priode tertentu bagi organisasi/perusahaan. Menurut Dedi Nordiawan (2012:15) anggaran mempunyai banyak manfaat antara lain, yaitu :

1. Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen (divisi) yang satu dengan departemen (divisi) lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.
2. Anggaran menyediakan informasi tentang hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah. Hal ini akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang harus diambil.
4. Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi kesesuaian tujuan perusahaan/organisasi dengan tujuan karyawan.
5. Anggaran sebagai alat pengawas yang baik, jika perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen perusahaan dapat

membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam perusahaan/organisasi.

Sedangkan menurut M. Nafarin (2013:20) manfaat anggaran antara lain :

- a) Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama.
- b) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan.
- c) Dapat memotivasi karyawan
- d) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
- e) Menghindari pemborosan dan pembayaean yang kurang perlu
- f) Sumber daya (seprtu tenaga kerja, peralatan dan dana) dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- g) Alat pendidikan bagi para manajer.

f. Karakteristik Anggaran

Menurut Rudianto (2009:4), anggaran merupakan alat yang utama dalam perencanaan jangka pendek yang efektif dan pengendalian dalam organisasi dan anggaran mempunyai karakteristik antara lain, yaitu :

1. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit perusahaan.
2. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter
3. Anggaran meliputi priode selama setahun
4. Anggaran merupakan komitmen manajemen
5. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusun anggaran
6. Anggaran yang telah disusun dapat diubah jika terjadi kesalahan khusus

7. secara periodik dilakukan analisis antara anggaran dengan sesungguhnya dan dijelaskan.

g. Indikator Anggaran

Menurut Milani (dalam M. Nafarin, 2013) indikator dalam partisipasi anggaran, antara lain :

1. keterlibatan

Pada penyusunan anggaran perlu diketahui siapa yang terlibat dan siapa saja yang perlu mengetahuinya

2. pengaruh terhadap anggaran

Setiap anggaran yang telah dibuat harus memiliki pengaruh dalam sebuah kegiatan, dan sejauh mana anggaran juga dipengaruhi oleh pengurus (manajer) agar mencapai tujuan (sasaran) yang diinginkan oleh sebuah organisasi/perusahaan.

3. komitmen

anggaran yang telah disusun harus didiskusikan ke pihak manajer (para pihak yang terlibat) dan harus memiliki pertanggungjawabannya atas penyusunan anggaran yang telah disusun.

2. Perencanaan pembangunan

a. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Dalam suatu organisasi/perusahaan yang memiliki tujuan selalu ada yang namanya perencanaan yang dibuat untuk suatu periode tertentu. Perencanaan dibuat sebagai tolak ukur bagi manajemen untuk kelancaran dan keberhasilan dalam suatu tujuan yang dibuat oleh organisasi/perusahaan. Secara umum perencanaan

merupakan proses penentuan tujuan organisasi/perusahaan dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategeis-strategis (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara menyeluruh, (Erly Suandy, 2009). Adapun menurut David (2011) perencanaan adalah proses dimana seseorang menentukan apakah ia akan menyelesaikan tugas dengan cara yang berbeda dari cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan mempersiapkan untuk mengatasi kesulitan tak terduga dengan sumberdaya yang memadai.

Pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (G. R Terry dalam Sukarna, 2011:10). Perencanaan adalah susunan (rumus) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, (Abe dalam Ovelhanif, 2009). Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2009) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Menurut Handoko (2010) perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan menurut Newman (dalam Manullang, 2010) adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Perencanaan pembangunan adalah

proses modernisasi perubahan menyeluruh dari masyarakat tradisional atau pra modern ke bentuk penguasaan teknologi dan perubahan organisasi sosial masyarakat dengan ciri meningkatkan kesejahteraan ekonomi, stabilisasi politik seperti dunia barat, (Mark Turner Dan David Hulme). Menurut Coralie Bryant dan Louise G. White perencanaan pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi. Pertama, memberikan perhatian terhadap kapasitas, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. Kedua, mencakup keadilan, perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

b. Tujuan Perencanaan Pembangunan

Dalam suatu kegiatan baik dalam itu organisasi/perusahaan semua harus direncanakan. Perencanaan sangat berguna untuk mengurangi suatu kesalahan yang akan dibuat atau bertujuan untuk membuat suatu kegiatan/pekerjaan lebih baik. Ada beberapa tujuan perencanaan menurut Husaini Usman (2011:65), yaitu :

1. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan
3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kuantitasnya
4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan

5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan
7. Menyeraskan dan memadukan beberapa subkegiatan
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui, dan
9. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

c. Manfaat Perencanaan Pembangunan

Manfaat perencanaan bagi suatu organisasi/perusahaan sangat banyak salah satunya sebagai pengawasan. menurut Husaini Usman manfaat perencanaan sebagai berikut :

1. Standar pelaksanaan dan pengawasan
2. Pemilihan berbagai alternatif terbaik
3. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
5. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
6. Alat untuk memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait, dan
7. Alat untuk meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

d. Jenis Perencanaan Pembangunan

Menurut Hecket dan Wilson yang diterjemahkan oleh Gunawan Hutaaruk (2010:125-126) jenis perencanaan dapat dibedakan 3 jenis, yaitu :

1. Perencanaan strategis

Perencanaan ini merupakan rencana jangka panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan ini fokus pada seluruh organisasi, baik itu rencana secara umum yang menggambarkan alokasi

sumberdaya, prioritas, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis.

2. Perencanaan taktis

Perencanaan ini ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (1-5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis. Perencanaan taktis biasanya di buat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah.

3. Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai fokus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek (kurang dari 1 tahun) dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan, Widjono Hs (2010). Ada 2 jenis rencana operasional sebagai berikut:

a) Rencana Tunggal (sekali pakai)

Rencana tunggal adalah rencana yang dilakukan sekali pakai, sebagai contoh ketika perusahaan/organisasi merencanakan ekspansi, pembuatan kantor baru, penarikan tenaga kerja baru dan lainnya.

b) Rencana *Standing*

Rencana *Standing* adalah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang. rencana ini bisa menghemat waktu dan tenaga karena rencana ini bisa diterapkan pada situasi yang sama.

e. Indikator Perencanaan Pembangunan

Menurut Abe (dalam Ovalhanif, 2009) indikator dari perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi.

Dimana kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan di lakukan oleh sebuah organisasi yang telah di sepakati, baik dalam kegiatan internal maupun eksternal.

2. Kapan akan dilakukan, berapa lama.

Rencana kegiatan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan biasanya perencanaan kegiatan dapat memakai waktu 1 sampai 5 tahunan sesuai rencana pekerjaan yang dilakukan.

3. sumberdaya yang dibutuhkan

Perencanaan yang dilakukan perusahaan/organisasi juga harus mempertimbangan sumberdaya yang akan digunakan agar dapat mempercepat pekerjaan/kegiatan dalam menyelesaikan tujuan yang dilakukan oleh perusahaan/organisasi

4. kemajuan (program)

program yang telah dibuat atau di perencana sesuai dengan tujuan perusahaan/organisasi mencapai tahap lebih baik, dalam hal ini perencanaan yang telah disepakati perlu juga di lakukan tahap pengawasan.

3. Pengendalian Pembangunan

a. pengertian pengendalian Pembangunan

Pengendalian adalah bagian dari rencana yang sudag dibuat dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh

organisasi. Menurut Dessler dan Dharma (2009) mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko. Pengendalian merupakan suatu proses penjaminan di mana organisasi/perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, (Hasibuan, 2010:39).

Sedangkan Harahap (2011:89) pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai pelurusan (korektif). Pengendalian merupakan memantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja terhadap tujuan-tujuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan, (Mathis dan Jackson, 2009:89). Adapun menurut Sondang P. Siagian (2010:176) menjelaskan bahwa pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian adalah perbandingan kinerja saat ini terhadap standar yang telah ditentukan yang terkandung dalam rencana, dengan maksud untuk memastikan kemajuan yang memadai dan kinerja yang memuaskan, (ELF Breach). Menurut mulyadi (2014) aktifitas pengendalian adalah kebijakan prosedir yang dibuat untuk memastikan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan.

b. Fungsi Pengendalian pembangunan

Adapun fungsi pengendalian menurut Supriyono (2010:25) adalah sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang, atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.

c.Langkah-Langkah Pengendalian Pembangunan

Langkah proses pengendalian menurut Supriyono (2010:10) yaitu, sebagai berikut :

1. menemukan objek-objek yang akan diawasi
2. menetapkan standar sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki
3. menentukan prosedur, waktu, dan teknik yang digunakan
4. membandingkan antara hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan
5. melakukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap suatu penyimpangan.

d. Karakteristik Sistem Pengendalian Pembangunan

Terdapat karakteristik pengendalian dalam sebuah anggaran agar pengendalian dapat berjalan dengan baik dan efektif. Karakteristik pengendalian menurut Supriyono (2010:13) antara lain sebagai berikut :

1. Akurat, yaitu setiap data dari sistem pengendalian harus akurat sebab jika tidak maka akan mengakibatkan organisasi tidak tepat dalam mengambil keputusan untuk mengoreksi suatu penyimpangan.

2. Tepat waktu, yaitu informasi segera dikumpulkan , diarahkan dan segera pula dievaluasi jika hendak diambil tindakan yang tepat pada waktunya untuk perbaikan
3. Objektif dan komprehensif yaitu sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya.
4. diputuskan pada titik pengendalian strategis, yaitu sistem pengendalian sebaiknya diputuskan pada daerah yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan.
5. Ekonomis, yaitu biaya untuk implementasikan sistem pengendalian sebaiknya lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Fleksibel, dimaksudkan untuk lebih mudah bertindak dalam mengatasi perubahan yang kurang menguntungkan atau memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru.
7. dapat diterima oleh berbagai pihak. Sistem pengendalian dapat menghasilkan prestasi kerja yang tinggi diantara para anggota organisasi dengan perasaan bahwa mereka memiliki tanggung jawan dan kesempatan untuk mencapai tujuan
8. Dapat dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi. Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Setiap langkah dalam proses pekerjaan dapat mempengaruhi keberhasilan kegagalan seluruh operasi.
 - b. Informasi pengendalian harus sampai kepada semua orang yang perlu menerimanya.

e. Indikator Pengendalian Pembangunan

Menurut Murtanto (dalam Supriyono, 2010:15) terdapat 5 komponen di dalam pengendalian, sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian

Pemimpin instansi pemerintahan menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a) penegakan intergrasi dan nilai etika
- b) kepemimpinan yang kondusif
- c) pendelegasian wewenangan dan tanggungjawab yang tepat
- d) komitmen terhadap kompetensi

2. Penilaian resiko

- a) penilaian resiko terdiri dari indentifikasi resiko dan analisis resiko
- b) dalam rangka penilaian resiko, pemimpin instansi pemerintah harus menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan.

3. kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan komunikasi

Komunikasi atau informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi

pemerintahan harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelolah, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi.

5. Pemantauan

Pemimpin instansi pemerintahan wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian, baik melalui kegiatan pengelolaan, perbandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

4. Pembangunan

a. Definisi pembangunan

Pembangunan merupakan suatu tindakan perubahan sosial ekonomi, dimana proses pembangunan harus bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah saja. Menurut Subandi (2011) proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industry atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan berencan lebih dirasakan sebagai usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa, (Sondang P. Siagian, 2010).

Sedangkan pembangunan menurut Rogers (dalam Rochajat,dkk: 2011:3) pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan

ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Adapun menurut W.W Rostow (2011:4) Pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan didefinisi oleh Ginanjar Kartasasmita (dalam Rochajat, dkk: 2011:4) yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan Dudley Seer's dalam bukunya yang berjudul *The meaning of Development* bahwa definisi pembangunan atau pengertian pembangunan adalah proses merealisasikan potensi personaliti manusia. Pembangunan dapat diartikan sitiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketinggalan, dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat, Benny H. Hoed (2011).

b. Tujuan Pembangunan

Tujuan pembanguna untuk mensejahterakan masyarkan dimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menunjang kehidupan masyarkat yang ada. Dalam melakukan pembangunan memiliki perencanaan dimana perencanaan tersebut sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan antara pelaku pembangunan
2. menjamin sinkronisasi san sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah/desa
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,

sedangkan menurut Sudiharto djiwandono tujuan pembangunan desa meliputi :

1. Tujuan ekonomis, yaitu meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan, dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial, kearah pemerataan kesejahteraan penduduk desa
3. Tujuan kultur, dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan
4. Tujuan politis, dalam arti menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengemabangkan selanjutnya hasil-hasil pembangunan.

c. Indikator Pembangunan

Menurut ringkasan Deddy T. Tikson (2011) ada lima indikator tentang pemabangunan, sebagai berikut :

1. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Indikator ini merupakan bagian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2. Struktur Ekonomi

telah menjadi asumsi bahwa peningkatan per kapita akan mencerminkan tranformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dimana struktur ekonomi menjadi tolak ukur dalam suatu daerah/Negara dalam meningkatkan kesajahteraan masyarakat.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi.

5. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam suatu negara baik itu negara berkembang dan negara maju fungsi pemerintah di perlukan untuk merencanakan dan mengontrol semua kegiatan yang akan di lakukan untuk kemajuan negaranya. Dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan yang diawasi oleh masyarakat/warga negara yang berada di negara itu. Pengertian pemerintah daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik indonesia tahun 1945.

b. Fungsi Pemerintah Daerah

fungsi pemerintah daerah sendiri adalah sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur serta melaksanakan jalannya pemerintahan. Sedangkan menurut undang-undang no. 32 tahun 2004 pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah adalah sebagai yang mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah bertujuan sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat umum serta daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah mempunyai hubungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang mana hubungan tersebut terdiri dari wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

B. Penelitian Pendahulu

Tabel 2.1 Penelitian Pendahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Dina Nur Afiani (2010)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran Dan Asimetri Informasi Terhadap Senjangan Anggaran Pada Instansi Pemerintahan Daerah. (studi pada pemerintahan daerah daerah kabupaten semarang)	Partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi	Senjangan anggaran	Regresi Linier Berganda	Partisipasi anggaran, penekanan anggaran dan asimetri informasi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran pada Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang.

2	Nivo Wulandari (2007)	Pengaruh Partisipasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).	Partisipasi dan komitmen organisasi	Kinerja aparat pemerintah	Multiple Regresion	Partisipasi Anggaran Dan Komitmen Organisasi Secara Simultan Dan Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Padang
3	Farida ulfa (2008)	Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi Pada Pengolahan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto)	Perencanaan, pengendalian dan pembangunan	Peranan anggaran	Metode Kualitatif Pendekatan Analisis Deskriptif	Perencanaan, Pengendalian Dan Pembangunan Secara Parsial Dan Sumiltan Berpengaruh Signifikan Terhadap Anggaran Yang Ada Di Daerah Mojokerto
4	Ika Maya Sari (2018)	Analisis anggaran belanja daerah sebagai alat pengendalian pada daerah badan pengolahan keuangan dan asset daerah kabupaten bombana	Alat pengendalian	Anggaran belanja	Analisis Deskriptif	Realisasi anggaran biaya pada tahun 2015 dan 2016 dikategorikan menguntungkan karena jumlah realisasi lebih sedikit di bandingkan dengan anggaran belanja daerah yang direncanakan.

sumber: diolah penulis, 2018

C. Kerangka Konseptual

Iskandar (2010:55) mendefinisikan kerangka konseptual merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam rangka mencari jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah penelitian yang menjelaskan tentang variabel-variabel, hubungan antara variabel-variabel secara teoritis yang berhubungan dengan hasil penelitian yang terdahulu yang kebenarannya dapat di uji secara empiris.

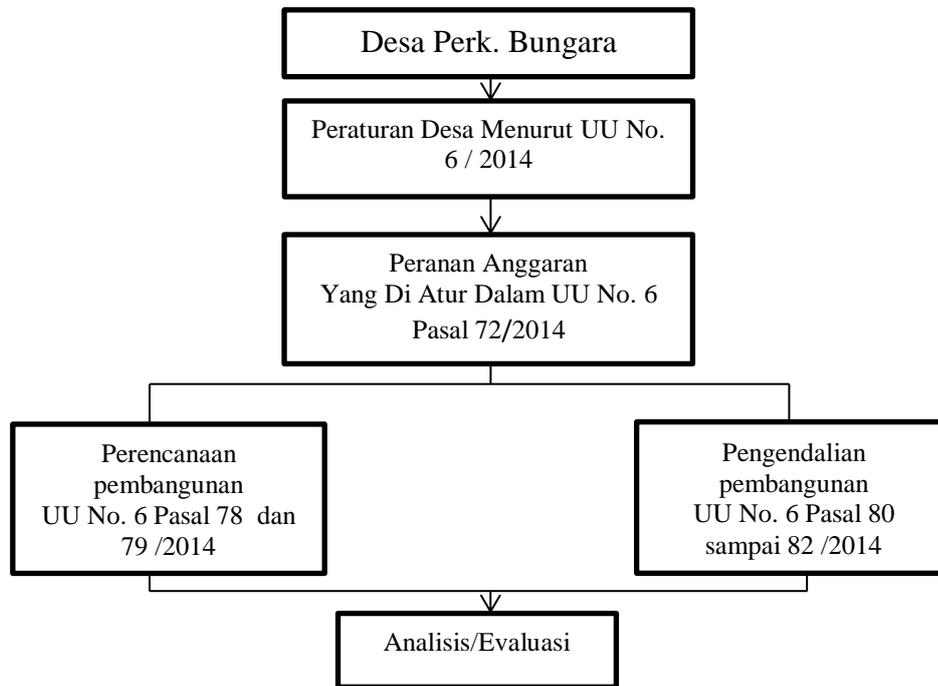
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 6 pasal 1 / 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peranan anggaran yang di atur Undang- Undang No. 6 pasal 72 / 2014, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh Kepala Desa Dan Dimusyawarakan Bersama Bdan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang di atur dalam Undang-undang No. 6 pasal 79 ayat 1/2014.

Pengendalian pembangunan yang di atur dalam undang-undang no. 6 pasal 80-82 / 2014, dimana masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksana pembangunan desa pada ayat 3 masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagi keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Dalam penjelasan teori diatas, maka penulis membuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012) pengertian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kabupaten Langkat

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2018 sampai dengan bulan April, dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

no	Aktivitas	Bulan																							
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal/Pengajuan Judul			■																					
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
3	Seminar Proposal											■													
4	Perbaikan acc proposal														■										
5	Pengolahan data															■									
6	Penyusunan skripsi																			■					
7	Bimbingan skripsi																	■	■	■	■				
8	Meja hijau																								■

sumber : diolah penulis 2018

C. Populasi Dan Sampel/Jenis Dan Sumber Data

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012).Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai desa Perkebunan Bungara Di Kabupaten Langkat yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2012). Dalam penelitian ini, sampel yang diambil penulis adalah pegawai yang terlibat dalam pembuatan dan penyusunan anggaran desa Perkebunan Bungara tahun 2018. Disini penulis menggunakan sampel secara *non probability sampling* yaitu dengan menggunakan sampel jenuh/sensu karena seluruh populasi di jadikan sampel apabila kurang dari 100 orang/responden.

3. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini di dapatkan dari wawancara (*interview*) dan angket (*quisioner*) pada karyawan/pegawai yang ikut dalam melakukan penyusunan anggaran. Sumber data pada penelitian ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran Desa Perkebunan Bungara tahun 2018 dan data sekunder pada penelitian peneliti ini bersumber dari data anggaran realisasi perkebunan bungara tahun 2018 yang telah tersusun.

D. Definisi Operasional Variabel

1. definisi operasional

Definisi operasional adalah rumusan atau gambaran yang jelas untuk memudahkan penelitian, maka dari itu definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel. 3.2 operasional variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Anggaran (Y)	Anggaran (<i>budget</i>) merupakan suatu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Nafarin (2013)	1. Keterlibatan 2. Pengaruh Terhadap Anggaran 3. Komitmen (Milani dalam M. Nafarin, 2013)	Likert
Perencanaan Pembangunan (X ₁)	Perencanaan adalah susunan (rumus) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. (Abe dalam Ovalhanif, 2009)	1. apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi 2. kapan akan dilakukan, berapa lama 3. sumberdaya yang dibutuhkan 4. kemajuan (Abe dalam Ovalhanif, 2009)	Likert
Pengendalian Pembangunan (X ₂)	Pengendalian merupakan memantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja terhadap tujuan-tujuan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan, (Mathis dan Jackson, 2009:89).	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penelian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi Dan Komunikasi 5. Pemantauan (Murtanto dalam Supriyono, 2010)	Likert

Sumber : penulis 2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi sesuai yang dibutuhkan peneliti.
2. Dokumentasi yaitu sejarah singkat perusahaan, visi-misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan lain-lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data pada metode deskriptif menurut sugiyono (2012) sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih terperinci.

2. Display data

Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian diperoleh.

3. Kesimpulan/Varifikasi

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Kantor Desa Perkebunan Bungara

pada tahun 1957 terbentuklah suatu desa perkebunan bungara, dimana desa tersebut d pimpin oleh bapak alm. Paijo. Dimana pada masa itu pemilihan kepala desa dan masa jabatan tidak di tentukan, beliu menjabat sampai 1965 dan di gantikan oleh Alm. Bapak Amat, beliau menjabat sampai dengan tahun 1985. Lalu digantikan dengan Bapak Joko Sungkono hingga tahun 1989 dan Alm. Ismail sampai tahun 2000 dan digantikan oleh Bapak Zulkarnain, beliau menjabat 8 tahun lamanya dan pada 2008 baru lah digantikan dengan Alm. Bapak Sukarsun dan setelah itu jabatan kepala desa di lanjutkan oleh Nuraini pada tahun 2015.

Pada masa kepala desa joko sungkono, masyarakat perkebunan bungara baru melakukan pemlihan kepala desa, dimana pada masa itu kantor kepala desa pinjam pakaikan oleh perusahaan perkebunan bungara dan sampai sekarang pun lahan masih di pinjam pakaikan

b. Visi Dan Misi Kantor Desa Perkebunan Bungara

1) Visi Kantor Desa Perkebunan Bungara

Menuju pemerintah desa perkebunan bungara yang mampu terwujudnya masyarakat yang berbudaya maju menuju kemandirian.

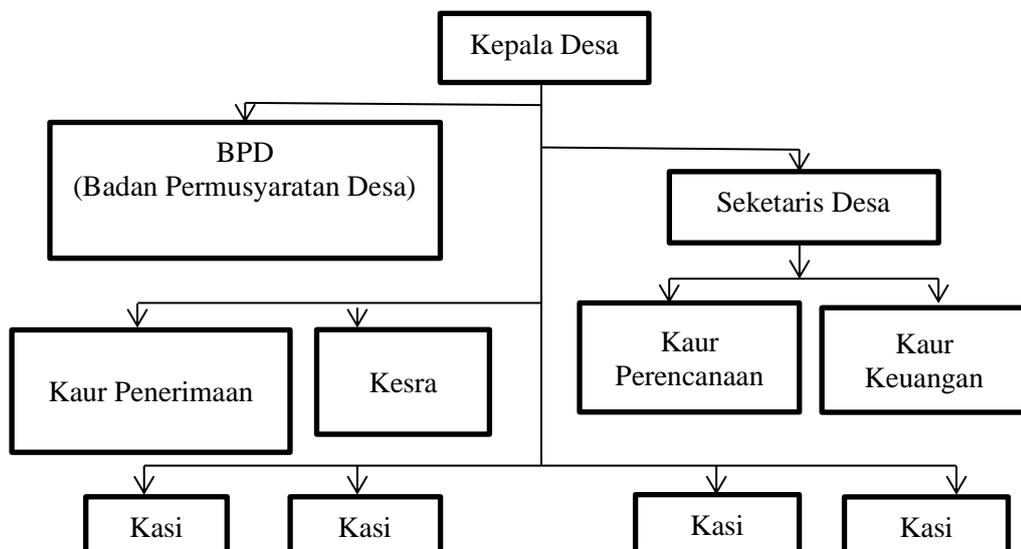
2) Misi Kantor Desa Perkebunan Bungara

a) Menyelenggarakan pelayanan masyarakat

- b) Melaksanakan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif, bermanfaat terpelihara dan berkelanjutan, serta peningkatan perwujudan pembangunan prasaran masyarakat.
- c) Melaksanakan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya, pemuda dan adat istiadat.
- d) Bekerjasama demi kemasruran Desa Perkebunan Bungara yang bersifat bergotong-royong demi terwujudnya masyarakat yang berbudaya.
- e) Menjaga wilayah yang kondusif
- f) Mewujudkan pemerataan pembangunan desa yang berkeadilan demi mempersejahterakan masyarakat Desa Perkebunan Bungara

c. Struktur Kantor Desa Perkebunan Bungara

STRUKTUR KANTOR DESA PERKEBUNAN BUNGARA



Sumber: diolah penulis 2019

Gambar 4.1 Struktur Kantor Desa Perkebunan Bungara

d. Deskripsi Tugas

1) Kepala Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 pasal 26 /2014 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan memperdayakan masyarakat desa. Selain bertugas kepala desa juga memiliki wewenang sebagai mana yang di jelaskan dalam UU No. 6 pasal 26 ayat 1/2014 sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d) Menetapkan peraturan desa
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f) Membina kehidupan masyarakat desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

- l) Memanfaatkan teknologi tepa guna
- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Seketaris Desa

Penjelasan Undang-Undang No. 6 pasal 49/ 2014 sekretaris desa bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa.

3) Badan Permusyaratan Desa (BPD)

Badan permusyaratan desa memiliki sebagai mana di jelaskan dalam Undang-Undang No. 6 pasal 55/ 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

4) Kepala Urusan Keuangan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Adapun fungsi kepala urusan perencanaan sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa

- b) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
- c) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintah desa
- e) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa
- f) Menyusun laporan kegiatan desa

5) Kepala Urusan Keuangan

Kapala urusan keuangan bertugas melaksanakan penyusunan anggaran serta ketatausahaan, mebantu tugas-tugas dibidang perpajakan dan menyusun pertanggungjawaban keuangan. Adapun fungsi kepala urusan keuangan sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan rencana pemerintah desa dalam penyelenggaraan keuangan desa
- b) Penyusunan rencana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang keuangan desa
- c) Penyusunan data laporan penyelenggaran keuangan desa
- d) Pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keuangan desa,

6) Kaur Kesra (Kepala Kesejahteraan Rakyat)

Tugas pokok kesra adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan program keagamaan serta melaksanakan program

pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Adapun fungsi kesra sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
- b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, dan
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan kepala desa

7) Kepala Urusan Penerima

Tugas kaur penerima adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan. Adapun fungsi kaur penerima adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- b) Pelaksanaan pengelola administrasi umum
- c) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- d) Mengelola administrasi data perangkat desa
- e) Membuat persiapan bahan-bahan laporan, dan

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

8) Kepala Seksi

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. Adapun fungsi kasi adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
- b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan Kepala Desa.
- c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
- d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
- e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil, dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lama 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- e. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku sendirinya.
- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- g. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Pembatalan hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
- i. Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBdesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah daerah.
- j. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

3. Pengendalian Pembangunan Desa

Dalam tahap pengendalian pembangunan desa sebagaimana yang di atur dalam permendagri no. 114 tahun 2014 pasal 84-87 menjelaskan tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sebagai berikut:

a. Pasal 84

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupate/kota, dan pemerintah desa melakukan upaya pemeberdayaan masyarakat desa.

- 2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat
- 3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- 4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

b. Pasal 85

- 1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- 3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.

4) Hasil pemantauan pembangunan desa sebagaimana di maksud pada ayat 1, dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan desa.

c. Pasal 86

1) Bupati/walikota melakukan pemantuan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara :

- a) Memantau dan mengawasi jadwal perencana dan pelaksanaan pembanguna desa
- b) Menerima. Mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
- c) Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa, dan
- d) Memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah desa.

2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencana dan pelaksanaan pembanguna desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, bupati/walikota melakukan :

- a) Menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa
- b) Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan Desember tahun berjalan; dan

c) Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 87

Kegiatan dan format pembangunan desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

4. Penyusunan Dan Pengelolaan Anggaran Desa

Dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran kita memerlukan proses perencanaan dan pengendalian yang dimana bagian ini diperlukan dalam sebuah organisasi dalam menjalankan manajemen yang baik. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua fungsi manajemen yang saling mengisi. Pada organisasi pemerintahan yang merupakan organisasi nirlaba atau organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan publik yakni melayani masyarakat demi terciptanya kemakmuran, maka perencanaan yang dibuat untuk mamakmurkan masyarakat dibentuk dalam program-program pembangunan. Perencanaan tersebut harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar masyarakat bener-bener mendapatkan pelayanan yang semestinya. Apabila perencanaan sudah dilakukan dengan baik maka akan memudahkan untuk mengendalikan segala yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh Pemerintah Desa.

a. Penyusunan rancangan anggaran desa:

1) Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD.

- 2) Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat.
- 3) Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa.
- 4) Anggaran desa yang telah disempurnakan, diajukan, dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa.

b. Pembahasan anggaran desa:

- 1) Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (selambat-lambatnya 7×24 jam sebelumnya).
- 2) Anggaran desa usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari Kepala Desa. Anggaran desa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD.
- 3) Anggaran desa yang telah disampaikan kepada Pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.
- 4) Anggaran desa yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi.
- 5) Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes dan atau para pengusul dari anggota BPD).
- 6) Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.
- 7) Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul.
- 8) Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.

c. Persetujuan dan pengundangan anggaran desa:

- 1) Apabila anggaran desa tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3×24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus sudah disempurnakan.
- 2) Apabila anggaran desa yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui.
- 3) Anggaran desa yang telah disetujui BPD, harus disampaikan kepada Pemerintah Desa, misalnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APB-Desa oleh Kepala Desa.
- 4) Apabila anggaran desa yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu.

d. Peraturan pelaksanaan anggaran desa:

- 1) Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.
- 2) Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan BPD dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan.

e. Laporan anggaran yang sudah tersusun:

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Penyerapan Dan Pencapaian Output Dana Desa Sampai Dengan Tahap III Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Perkebunan Bungara Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan transfer	0	0	0
1.2	Dana desa	685.685.000		
	Tahap pertama		137.131.600	
	Tahap kedua		274.263.200	
	Tahap ketiga		274.263.200	
	Jumlah Pendapatan	685.685.000	685.685.000	0
2	Belanja Bantuan Desa Perkebunan Bungara			
2.1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa			
2.1.1	Penyelenggaraan lomba antar kewilayaan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa	17.000.000	17.000.000	0
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa			
2.2.1	Pembangunan/rehabilitasi/penin gkatan/pengerasan jalan desa			
	Jalan desa	58.100.868	57.550.000	550.868
2.2.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peni ngkatan Monumen/Gapura/Batas Desa			
	Monumen/Gapura/Batas Desa	86.969.656	86.788.000	181.656
2.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/Pkd			
	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	82.779.172	82.674.999	104.173
2.2.4	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)			
	Terselenggaranya Oprasional pos Kesehatan Desa (PKD Polindes milik Desa Lainnya)	8.400.000	8.400.000	0
2.2.5	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)			
	Makanan Tambahan	13.000.000	13.000.000	0
2.2.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peni ngkatan/Pengadaan			

	Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD			
	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	66.675.000	66.675.000	0
2.2.7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Besejarah Milik Desa/Petilasan			
	Pemakaman Milik Desa	7.029.413	6.980.000	49.413
2.2.8	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Oprasional, Dst)			
	Oprasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	5.000.000	5.000.000	0
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2.3.1	Pembinaan/ Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/Klub Olahraga			
	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub olahraga	6.500.000	6.500.000	0
2.3.2	Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/sarana dan Prasarana Kepemudaan Dan olah Raga Milik Desa			
	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	56.000.000	55.960.000	40.000
2.3.3	Pembinaan PKK			
	Terselenggaranya Pembinaan PKK	34.988.000	34.988.000	0
2.3.4	Pembinaan Grup Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa			
	Terselenggaranya Pembinaan Gruop Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa	147.007.000	145.500.000	1.507.000
2.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa			
	Sarana Dan Prasaana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	61.208.891	61.208.891	0

2.2.6	Penyelenggara Fesitpal Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan ke Agamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dll) Tingkat Desa			
	Jumlah Penyelenggara Fesitpal Kesenian, Adat/Kebudayaan dan ke Agamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dll) Tingkat Desa	20.000.000	20.000.000	0
2.4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARATAN			
2.4.1	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Perternakan			
	Jumlah Peserta Pelatiha/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Perternakan	15.000.000	14.250.000	750.000
	JUMLAH BELANJA	685.685.000	682.474.890	3.183.110
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0	0
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)	0	3.183.110	(3.183.110)

Sumber : diolah penulis 2019

a. Pendapatan

1). Pendapatan Transfer

pendapatan transfer yang di peroleh di desa perkebunan bungara tidak ada, bisa di bilang anggaran desa tidak di peroleh oleh pendapatan transferan.

2). Dana Desa

Dana desa yang di anggarkan sebanyak Rp. 685.685.000 dan anggaran desa ini terbagi atas tiga tahapan dimana tahap pertama dana desa menerima realisasi sebesar Rp. 137.131.600 dan tahap kedua Rp.

274.263.200 dan terakhir tahap ketiga sebesar Rp. 274.263.200, sehingga jumlah pendapatan desa sebesar Rp. 685.685.000.

b. Belanja Bantuan Desa Perkebunan Bungara

1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa

Pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, anggaran direncanakan untuk membuat Penyelenggaraan lomba antar kewilayaan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa yang dianggarkan sebanyak Rp.17.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 17.000.000 sehingga anggaran yang tersisa tidak ada.

2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa

a) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PengerasanJalan

Desa

Pada pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengerasan jalan desa, dana anggaran yang direncanakan untuk pembangunan jalan desa sebesar Rp. 58.100.868 dan realisasi sebesar Rp. 57.550.000 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp. 550.868.

b) Pembangunan/rehabilitas/peningkata monumen/Gapura/batas desa

Dana anggaran yang direncanakan untuk pembangunan monumen/gapura/batas desa sebesar Rp. 86.969.656 dan realisasi sebesar Rp. 86.788.000 sehingga dana yang tersisa sebesar Rp. 181.656.

**c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/P
rasaran Posyandu/Polindes/PKD**

Dana anggaran yang direncanakan untuk gedung/bangunan posyandu/polindes/PKD sebesar Rp. 82.779.172 dan realisasinya sebesar Rp. 82.674.999 sehingga dana yang tersisa dari pembangunan tersebut sebesar Rp. 104.173.

d) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Dana anggaran yang direncanakan untuk terselenggaranya operasional pos kesehatan desa (PKD Polindes milik desa lainnya) sebesar RP. 8.400.000 dan realisasinya sebesar Rp. 8.400.000, sehingga dana yang tersisa tidak ada.

e) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Dana anggaran yang direncanakan untuk makanan tambahan menggunakan anggaran sebesar Rp. 13.000.000 dan realisasinya sebesar Rp.13.000.000 sehingga dan anggaran yang tersisa tidak ada.

**f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Pr
asarana/Posyandu/Polindes/PKD**

Anggaran yang direncanakan untuk peralatan kesehatan posyandu/polindes/PKD sebesar Rp. 66.675.000 dan realisasi sebesar Rp. 66.675.000 sehingga dana anggaran yang tersisa tidak ada.

g) Pembangunan/Rehabilitasi//Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan

Anggaran yang direncanakan untuk pemakaman milik desa sebesar Rp. 7.029.413 dan realisasi sebesar Rp. 6.980.000, sehingga dana yang tersisa sebesar Rp. 49.413.

h) Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst)

Dana anggaran yang direncanakan untuk operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal milik desa sebesar Rp. 5.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 5.000.000 sehingga dan yang tersisa tidak ada.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga

Dana anggaran yang direncanakan untuk terselenggaranya pembinaan karang taruna/klub pemudaan/klub olahraga sebesar Rp. 6.500.000 dan realisasinya sebesar Rp. 6.500.00, sehingga dana anggara yang tersisa tidak ada.

2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Sarana Dan Prasarana Kepemudaaan Dan Olahraga Milik Desa

Dana anggaran yang direncanakan untuk sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa sebesar Rp. 56.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 55.960.000, sehingga dana anggaran yang tersisa sebesar Rp. 40.000.

3) Pembinaan PKK

Dana anggaran yang direncanakan untuk terselenggaranya pembinaan PKK sebesar Rp. 34.988.000 dan realisasinya sebesar Rp. 34.988.000, sehingga dana anggaran yang tersisa tidak ada.

4) Pembinaan Grup Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa

Dana anggaran yang direncanakan untuk terselenggaranya pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa sebesar Rp. 147.007.000 dan realisasinya sebesar Rp. 145.500.000, sehingga dana anggaran yang tersisa sebesar Rp. 1.507.000.

5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

Dana anggaran yang direncanakan untuk sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/ keagamaan milik desa sebesar Rp. 61.208.891 dan realisasinya sebesar Rp. 61.208.891, sehingga dana anggaran yang tersisa tidak ada.

6) Penyelenggara Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan Dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan Dll) Tingkat Desa

Dana anggaran yang direncanakan untuk Jumlah Penyelenggara Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dll) Tingkat Desa sebesar Rp. 20.000.000 dan realisasi sebesar Rp.20.000.000, sehingga dana anggaran yang tersisa tidak ada.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Perternakan

Dana anggaran yang direncanakan untuk Jumlah Peserta Pelatiha/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Perternakan sebesar Rp. 15.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 14.250.000, sehingga dana anggaran yang tersisa sebesar Rp. 750.000.

Pada jumlah belanja yang telah dibuat pada laporan anggaran tahap III tahun 2018 pemerintahan desa perkebunan bungara, untuk anggaran yang direncanakan berjumlah Rp. 685.685.000 dan realisasi yang dana sebesar Rp. 682.474.890 yang dimana terdapat dana sisa sebesar Rp. 3.183.110 yang dimana dana yang tersisa akan dimasukkan kepada laporan realisasi yang akan datang pada tahun 2019. Perencanaan anggaran yang telah dibuat oleh kantor desa perkebunan bungara sudah cukup bagus dimana laporan realisasi anggaran yang dibuat sudah terdetail karena adanya perencanaan yang disusun berdasarkan data, informasi, serta pengalama yang lengkap.

Untuk pengendalian dan pengolaan anggaran pada kantor desa perkebunan bungara sudah berfungsi sebagai alat pengendalian yang dimana jumlah anggaran sudah di dasari dengan perhitungan yang cermat dan anggaran realisasi yang sudah dibuat tidak lebih dan tidak terlalu kurang dikarenakan anggaran yang berlebihan yang dibuat dapat menjadi pemborosan yang membuat laporan anggaran dapat menjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan masalah.

B. Pembahasan

1. Hubungan Anggaran Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa Perkebunan Bungara

Dalam melakukan perencanaan baik itu dalam perencanaan yang berjangka waktu lama atau pun sementara selalu dibutuhkannya anggaran. Perencana dilakukan untuk bisa mengurangi pembiayaan yang akan di kerjakan. Berdasarkan penelitian dan hasil data yang saya peroleh bahwa anggaran yang ditetapkan atau disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pembangua di desa Perk. Bungara sudah terencana dengan baik dimana hasil penelitian saya juga di dukung oleh teori Tjokroamidjojo (2009) yang mana perencana sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efesien. Jadi dapat di simpulkan bahwa anggaran sangat berpengaruh akan terbuatnya perencanaan yang baik, dimana anggaran yang tersediakan di bagi untuk semua kebutuhan apa saja yang akan di rencanakan ke depannya.

2. Hubungan Anggaran Dengan Pengendalian Pembangunan Desa Pembangunan Bungara

Anggaran yang sudah direncanakan dengan baik perlu di lakukannya pengendalian anggar tidak terjadinya penyimpangan, dimana pengendalian dapat memberikan evaluasi untuk kegiatan yang sudah direncanakan baik untuk memantau kemanduan organisasi maupun mengurangi resiko yang telah dilakukan oleh sebuah organisasi/perusahaan. Dalam penelitian ini saya di dukung oleh teori Sondang P. Siagian (2010) menjelaskan bahwa pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi setelah saya melakukan riset saya mendapatkan hasil bahwa pengendalian pembangunan telah berjalan dengan baik dan sebagai pengawas anggaran yang sudah direncanakan atau dibuat oleh kantor Desa Perk. Bungara dengan sangat baik.

3. Hubungan Anggaran Dengan Pembangunan Desa Perkebunan Bungara

Pembangunan terjadi dikarenakan adanya anggaran yang sudah ditetapkan. Anggaran yang direncanakan bertujuan untuk mencapai pembangunan efektif dan efisien, dimana menurut W.W Rostow (2011) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Dari penelitian yang saya buat, anggaran yang sudah ditetapkan untuk desa Perk. Bungara sudah mencapai tujuan pembangunan yang di harapkan oleh masyarakat tersebut, dimana sudah banyak terjadinya perkembangan pembangunan antara lain seperti pembangunan jalan, gedung, serta peningkatan prasarana dan sarana lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka penelitian mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dari hasil laporan realisasi anggaran yang telah di buat pada tahun 2018, Kantor Desa Perkebunan Bungara sudah berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian untuk pembangunan desa.
- 2) Dalam penyusunan anggaran, Kantor Desa Perkebunan Bungara menggunakan data-data serta informasi yang bersumber dari laporan anggaran tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Fungsi anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Kantor Desa Perkebunan Bungara Kecamatan. Hal itu dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang anggaran belanjanya tidak satupun mengalami penyimpangan yang tidak menguntungkan (realisasi tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan) sehingga penyimpangan menguntungkan ini akan menjadi penghematan.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dipenelitian ini, penulis memberikan saran anggaran Kantor Desa Perkebunan Bungara dapat lebih baik, yaitu :

- 1) Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian serta pengawasan pada Kantor Desa Perkebunan Bungara sebaiknya tetap dipertahankan lebih cermat dalam menyusun anggaran agar asumsi-

asumsi yang tidak menyebabkan beberapa anggaran melebihi realisasinya dapat diminimalisi.

- 2) Dalam penyusunan anggaran sebaiknya kantor desa perkebunan bungara kecamatan bahork kabupaten langkat tidak hanya bersumber dari informasi laporan-laporan tahun sebelumnya tetapi dapat melihat kondisi keadaan tahun yang akan datang anggaran penyusunan anggaran dapat lebih bisa di hemat.
- 3) Sebaiknya anggaran dana desa yang dibuat harus lebih besar lagi untuk tahun yang akan datang, agar pembangunan di Desa Perkebunan Bungara lebih cepat selesai dan dapat lebih maju dari desa-desa yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Dharmanegara, Ida Bagus, Agung. (2010) *Pengganggaran Perusahaan, Edisi Pertama*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Garrison, Noreen & Brewer. 2007. *Akuntansi Manajerial*. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Buku 2. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat
- Husaini Usman. (2011) *Manajemen (Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan)*, Jakarta, Bumi Aksara
- Iskandar, (2010), *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta : GP press.
- Kartasmita (Dalam Rochajat, Dkk : 2011). *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- M. Nafari (2013). *Penganggaran Perusahaan*, Penerbit Salemba empat : Jakarta.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. KnE Social Sciences*, 760-770.
- Manullang (2010). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Muda University Pres.
- Mubyarto. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7)*.
- Nordiawan, Dedi. (2012). *Anggaran Disuatu Pemerintah*, Selemba Empat, Jakarta.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publikdan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.

Rusiadi Dkk. (2014). *Metode Penelitian : Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi Pembangunan*. Medan : USU Press.

Siagian, Sondang (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Binaputra Aksara.

Subandi, (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta, Alfabeta

Sugiyono, (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta : Alfabeta, CV

Sukarna, (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Supriyono, (2010) *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Kedua, Penerbit : BPFE Yogyakarta

<http://rumahbelajar.web.id/pengertian-tujuan-dan-manfaat-perencanaan/>

<http://www.artikelsiana.com/2017/08/pengertian-pembangunan-tujuan-menurut-para-ahli-ciri-ciri.html#>

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

<http://www.keuandangesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>

<https://hjtfruity.blogspot.com/2017/05/pengertian-pengendalian-menurut-para.html>

<https://www.ruangguru.co.id/pemerintah-daerah-pengertian-definisi-tujuan-dan-fungsinya-lengkap/>